

**PERAN PROGRAM KKN 57 KELOMPOK 10 DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
LOKAL MELALUI ADOPSI QRIS TERHADAP EFEKTIVITAS TRANSAKSI DAN
KEMAJUAN UMKM DI DESA KEDUNGWULUH, KEC. KALIMANAH, KAB.
PURBALINGGA**

***THE ROLE OF THE KKN 57 GROUP 10 PROGRAM IN EMPOWERING THE LOCAL
ECONOMY THROUGH QRIS ADOPTION ON TRANSACTION EFFECTIVENESS
AND MSME PROGRESS IN KEDUNGWULUH VILLAGE, KALIMANAH DISTRICT,
PURBALINGGA REGENCY***

Dila Bayu Isnaeni¹⁾, Tsabit Linggarjati²⁾, Anindya³⁾, Tarikh Trangginas⁴⁾, Annisa
Dwi⁵⁾ Muhammad Abimanyu⁶⁾, Ifan Fadhil⁷⁾, Khabib Zhen⁸⁾, Dwi Pamungkas⁹⁾,
Ghofar¹⁰⁾ Khusnul Khatimah¹¹⁾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Gokubayu001@gmail.com ¹⁾, Supirshesssbit@gmail.com ²⁾,

Anindya777@gmail.com ³⁾, TRingginas223@gmail.com ⁴⁾,

Annisaaaaa@gmail.com ⁵⁾, AbimanyuA049@gmail.com ⁶⁾,

IvanFB666@gmail.com ⁷⁾, MKhabibZhen@gmail.com ⁸⁾,

Dwipamss@gmail.com ⁹⁾, Ghofar@gmail.com ¹⁰⁾

Abstrak

Permasalahan utama yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungwuluh, Kec. Kalimanah, Kabupaten Purbalingga adalah masih dominannya sistem transaksi konvensional berbasis tunai serta rendahnya literasi digital dalam pemanfaatan sistem pembayaran non-tunai. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan efisiensi transaksi, minimnya pencatatan keuangan yang sistematis, serta kurang optimalnya daya saing usaha di tengah arus transformasi digital ekonomi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis peran Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui adopsi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) guna meningkatkan efektivitas transaksi dan kemajuan UMKM. Metode pengabdian dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang meliputi sosialisasi, pelatihan teknis penggunaan QRIS, serta pendampingan registrasi dan implementasi kepada pelaku UMKM. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman digital pelaku usaha, bertambahnya jumlah UMKM yang mengadopsi QRIS, serta meningkatnya efektivitas transaksi yang ditandai dengan kemudahan pembayaran, efisiensi waktu, dan transparansi pencatatan keuangan. Dengan demikian, Program KKN berkontribusi secara nyata dalam mendorong pemberdayaan ekonomi lokal dan mendukung akselerasi inklusi keuangan di tingkat desa.

Kata Kunci : KKN, Pemberdayaan Ekonomi Lokal, QRIS, UMKM, Efektivitas Transaksi, Literasi Digital

Abstract

The primary problem faced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Kedungwuluh Village, Kalimanah District, Purbalingga Regency was the dominance of conventional cash-based transactions and the low level of digital literacy in utilizing non-cash payment systems. This condition resulted in limited transaction efficiency, inadequate financial record-keeping, and suboptimal business competitiveness amid ongoing economic digital transformation. This community service activity aimed to analyze the role of the Community Service Program (KKN) in empowering the local economy through the adoption of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) to enhance transaction effectiveness and MSME development. The program was implemented using a participatory approach consisting of socialization, technical training on QRIS usage, and direct assistance in registration and implementation for MSME actors. The results indicated an improvement in digital understanding among business actors, an increase in the number of MSMEs adopting QRIS, and enhanced transaction effectiveness characterized by easier payment processes, time efficiency, and more transparent financial recording. Therefore, the KKN program contributed significantly to strengthening local economic empowerment and accelerating financial inclusion at the village level.

Keywords : Community Service Program, Local Economic Empowerment, QRIS, MSMEs, Transaction Effectiveness, Digital Literacy

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi keniscayaan dalam dinamika perekonomian global, termasuk di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong perubahan pola interaksi ekonomi dari sistem konvensional menuju sistem berbasis digital yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Digitalisasi ekonomi tidak hanya menyentuh sektor industri besar, tetapi juga merambah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dalam konteks sistem pembayaran, transformasi tersebut ditandai dengan meningkatnya penggunaan instrumen non-tunai sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. (Kementerian Koperasi, 2023) Perubahan ini menuntut adanya adaptasi di tingkat akar rumput agar pelaku usaha lokal tidak tertinggal dalam arus perkembangan ekonomi digital.

Kebijakan nasional terkait sistem pembayaran digital semakin menguat seiring dengan diperkenalkannya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode respons cepat. QRIS dirancang untuk menyederhanakan transaksi non-tunai lintas penyedia jasa pembayaran sehingga mempermudah pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi. (Jakarta:

Bank Indonesia, 2020) Implementasi QRIS diharapkan mampu meningkatkan efisiensi transaksi, meminimalisasi risiko peredaran uang tunai, serta memperluas akses UMKM terhadap ekosistem keuangan digital. Namun demikian, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kesiapan dan literasi digital pelaku usaha, khususnya di wilayah pedesaan.

Secara empiris, kondisi UMKM di Desa Kedungwuluh, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, masih menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sistem transaksi tunai. Pola transaksi konvensional tersebut dipandang lebih sederhana dan telah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam praktik perdagangan sehari-hari. Akan tetapi, ketergantungan pada uang tunai menimbulkan berbagai keterbatasan, antara lain risiko kehilangan, kesalahan penghitungan, serta keterbatasan dalam menjangkau konsumen yang telah terbiasa menggunakan pembayaran digital. Situasi ini berimplikasi pada rendahnya daya saing UMKM di tengah meningkatnya preferensi masyarakat terhadap sistem pembayaran non-tunai.

Selain itu, praktik pencatatan keuangan UMKM di Desa Kedungwuluh masih dilakukan secara manual dan belum terstandarisasi. Pencatatan berbasis buku tulis sederhana berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi, ketidakteraturan laporan keuangan, serta kesulitan dalam melakukan evaluasi perkembangan usaha. Di sisi lain, akses terhadap sistem pembayaran digital juga masih terbatas, baik karena kurangnya informasi, minimnya pendampingan teknis, maupun persepsi bahwa penggunaan teknologi pembayaran memerlukan proses yang rumit. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan digitalisasi di tingkat nasional dengan realitas kesiapan pelaku usaha di tingkat desa.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi lokal melalui pendekatan partisipatif mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat (Sari, 2021). Transformasi digital UMKM juga terbukti berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi operasional dan perluasan pasar (Pratama & Hidayat, 2022). Selain itu, implementasi QRIS di sejumlah daerah rural dilaporkan mampu mendorong inklusi keuangan dan mempermudah transaksi masyarakat (Rahmawati, 2023).⁵ Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa digitalisasi pembayaran memiliki potensi strategis dalam mendukung pertumbuhan UMKM, sepanjang diiringi dengan proses edukasi dan pendampingan yang memadai.

Meskipun demikian, sebagian besar studi lebih menekankan pada aspek kebijakan atau dampak makro implementasi QRIS, sementara pendekatan berbasis komunitas melalui program pengabdian mahasiswa masih relatif terbatas dikaji secara mendalam. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pendampingan langsung yang bersifat partisipatif dan kontekstual di tingkat desa belum sepenuhnya optimal dalam mendukung adopsi QRIS oleh UMKM. Padahal, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan instrumen teknologi, tetapi juga oleh proses pemberdayaan yang membangun pemahaman, kepercayaan, dan keterampilan pelaku usaha secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk menganalisis peran Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui adopsi QRIS terhadap efektivitas transaksi dan kemajuan UMKM di Desa

Kedungwuluh. Program KKN diposisikan sebagai instrumen intervensi sosial-edukatif yang menjembatani kebijakan digitalisasi nasional dengan kebutuhan riil masyarakat desa. Melalui pendekatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan partisipatif, pengabdian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas transaksi, penguatan literasi digital, serta percepatan transformasi ekonomi lokal berbasis teknologi pembayaran digital.

Transformasi digital telah menjadi keniscayaan dalam dinamika perekonomian global, termasuk di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong perubahan pola interaksi ekonomi dari sistem konvensional menuju sistem berbasis digital yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Digitalisasi ekonomi tidak hanya menyentuh sektor industri besar, tetapi juga merambah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional (Bukht & Heeks, 2017). Dalam konteks sistem pembayaran, transformasi tersebut ditandai dengan meningkatnya penggunaan instrumen non-tunai sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional (Bank Indonesia, 2020). Perubahan ini menuntut adanya adaptasi di tingkat akar rumput agar pelaku usaha lokal tidak tertinggal dalam arus perkembangan ekonomi digital.

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia juga didorong oleh meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan telepon pintar di kalangan masyarakat. Kemudahan akses teknologi telah mengubah perilaku konsumen yang cenderung memilih transaksi cepat, praktis, dan minim kontak fisik. Kondisi ini semakin menguat pascapandemi COVID-19 yang mempercepat pergeseran preferensi masyarakat terhadap pembayaran digital (OECD, 2020). Oleh karena itu, pelaku UMKM dituntut untuk mampu beradaptasi dengan ekosistem transaksi digital agar tetap kompetitif dan mampu mempertahankan keberlangsungan usahanya di tengah perubahan perilaku pasar.

Kebijakan nasional terkait sistem pembayaran digital semakin menguat seiring dengan diperkenalkannya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode respons cepat. QRIS dirancang untuk menyederhanakan transaksi non-tunai lintas penyedia jasa pembayaran sehingga mempermudah pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi (Bank Indonesia, 2019). Implementasi QRIS diharapkan mampu meningkatkan efisiensi transaksi, meminimalisasi risiko peredaran uang tunai, serta memperluas akses UMKM terhadap ekosistem keuangan digital (Rahayu & Day, 2017).

Secara konseptual, penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai pintu masuk bagi pelaku UMKM untuk mengakses layanan keuangan formal lainnya, seperti pencatatan transaksi otomatis, analisis penjualan, hingga akses pembiayaan berbasis data transaksi (World Bank, 2022). Dengan demikian, digitalisasi pembayaran memiliki implikasi yang lebih luas terhadap peningkatan kapasitas manajerial dan profesionalisme pengelolaan usaha kecil.

Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada kesiapan dan literasi digital pelaku usaha, khususnya di wilayah pedesaan. Kesenjangan digital (*digital divide*) masih menjadi tantangan utama, terutama terkait keterbatasan pemahaman teknologi dan minimnya pendampingan teknis (van Dijk,

2020). Tanpa adanya intervensi edukatif yang kontekstual, kebijakan digitalisasi berpotensi hanya berkembang di wilayah perkotaan dan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat desa.

Secara empiris, kondisi UMKM di Desa Kedungwuluh, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, masih menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sistem transaksi tunai. Pola transaksi konvensional tersebut dipandang lebih sederhana dan telah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam praktik perdagangan sehari-hari. Akan tetapi, ketergantungan pada uang tunai menimbulkan berbagai keterbatasan, antara lain risiko kehilangan, kesalahan penghitungan, serta keterbatasan dalam menjangkau konsumen digital (Arner, Barberis, & Buckley, 2016).

Selain itu, praktik pencatatan keuangan UMKM masih dilakukan secara manual dan belum terstandarisasi sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi serta kesulitan evaluasi usaha (Tambunan, 2019). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan digitalisasi di tingkat nasional dengan realitas kesiapan pelaku usaha di tingkat desa.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi lokal melalui pendekatan partisipatif mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat (Chambers, 2014). Transformasi digital UMKM juga terbukti berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi operasional dan perluasan pasar (Pratama & Hidayat, 2022). Selain itu, implementasi QRIS di wilayah rural mampu mendorong inklusi keuangan dan mempermudah transaksi masyarakat (Rahmawati, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk menganalisis peran Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui adopsi QRIS terhadap efektivitas transaksi dan kemajuan UMKM di Desa Kedungwuluh. Program KKN diposisikan sebagai instrumen intervensi sosial-edukatif yang menjembatani kebijakan digitalisasi nasional dengan kebutuhan riil masyarakat desa melalui pendekatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan partisipatif.

METODE PENGABDIAN

A. Desain dan Pendekatan Penelitian

Kegiatan pengabdian ini menggunakan desain pemberdayaan partisipatif (*participatory empowerment approach*) yang memadukan metode sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan partisipatif dipilih dengan pertimbangan bahwa proses transformasi digital tidak efektif apabila dilakukan secara top-down, melainkan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek utama dalam setiap tahapan kegiatan. Melalui pendekatan ini, pelaku UMKM tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat program, tetapi juga sebagai mitra pengabdian yang terlibat dalam proses identifikasi permasalahan, perencanaan solusi, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil program. Model pemberdayaan ini mengacu pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang menekankan penguatan kapasitas lokal dan partisipasi aktif komunitas dalam proses perubahan sosial (Mardikanto & Soebiato, 2017). Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam rangka program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berfokus pada

penguatan literasi digital dan implementasi sistem pembayaran non-tunai berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

B. Subjek Penelitian

Subjek pengabdian adalah pelaku UMKM yang beroperasi di Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Sasaran kegiatan meliputi pelaku usaha sektor kuliner, perdagangan kecil, serta jasa yang dalam aktivitas usahanya masih menggunakan sistem pembayaran tunai sebagai metode transaksi utama.

Pemilihan subjek dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu:

1. Pelaku usaha aktif di wilayah Desa Kedungwuluh
2. Belum menggunakan sistem pembayaran digital secara optimal
3. Bersedia mengikuti kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan QRIS

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di wilayah desa serta pada titik-titik usaha milik peserta program selama periode pelaksanaan KKN.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan pada tahap awal untuk memetakan kondisi UMKM, meliputi:

- Jumlah pelaku usaha,
- Jenis usaha,
- Sistem transaksi yang digunakan,
- Tingkat literasi digital pelaku UMKM.

Data observasi digunakan sebagai dasar penyusunan strategi intervensi program.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada pelaku UMKM untuk memperoleh informasi mengenai:

- Persepsi terhadap pembayaran digital,
- Kendala penggunaan teknologi,
- Pengalaman sebelum dan sesudah penggunaan QRIS.

3. Dokumentasi Dokumentasi berupa:

- Data registrasi QRIS,
- Foto kegiatan sosialisasi dan pelatihan,
- Catatan penggunaan QRIS dalam transaksi usaha.

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan secara berkala dengan mengamati:

- Frekuensi penggunaan QRIS,
- Kendala teknis maupun non-teknis,
- Respons dan tingkat kepuasan pelaku UMKM terhadap program.

D. Prosedur Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan proses pelaksanaan serta dampak kegiatan pengabdian secara menyeluruh. Tahapan analisis meliputi:

1. Reduksi Data

Menyaring dan mengelompokkan data hasil observasi, wawancara, dan monitoring sesuai fokus penelitian.

2. Penyajian Data (Data Display)

Data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap perubahan yang terjadi pada pelaku UMKM.

3. Penarikan Kesimpulan

Menafsirkan hasil kegiatan pengabdian terkait peran program KKN dalam mendorong adopsi QRIS serta peningkatan efektivitas transaksi UMKM.

Selain itu, digunakan pendekatan komparatif sederhana sebelum–sesudah (before–after comparison) untuk melihat perubahan efektivitas transaksi, khususnya pada aspek:

- Efisiensi waktu pembayaran,
- Kemudahan pencatatan transaksi,
- Pengalaman penggunaan sistem pembayaran digital.

Analisis ini bertujuan memberikan gambaran objektif mengenai kontribusi program terhadap kemajuan UMKM di Desa Kedungwuluh.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil pengabdian ini menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh, mulai dari identifikasi kondisi awal UMKM hingga evaluasi dampak adopsi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terhadap efektivitas transaksi dan kemajuan usaha. Pembahasan tidak hanya memaparkan temuan empiris di lapangan, tetapi juga mengaitkannya dengan kerangka teoretis pemberdayaan masyarakat dan transformasi digital ekonomi lokal.

Gambaran Kondisi Awal UMKM

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal, sistem pembayaran tunai masih mendominasi praktik transaksi pada sebagian besar UMKM di Desa Kedungwuluh. Pelaku usaha cenderung mempertahankan metode pembayaran konvensional karena dianggap lebih sederhana dan telah menjadi kebiasaan dalam aktivitas perdagangan sehari-hari. Namun demikian, dominasi transaksi tunai menimbulkan keterbatasan, terutama dalam menjangkau konsumen yang telah terbiasa menggunakan pembayaran digital.

Selain itu, tingkat literasi digital pelaku UMKM tergolong minim. Sebagian besar pelaku usaha belum memahami mekanisme pembayaran non-tunai, termasuk penggunaan QRIS sebagai instrumen pembayaran yang terstandarisasi secara nasional. Keterbatasan pemahaman ini berdampak pada rendahnya inisiatif untuk mengadopsi teknologi pembayaran digital, meskipun fasilitas tersebut secara umum telah tersedia.

Kendala lain yang ditemukan adalah praktik pencatatan transaksi yang masih dilakukan secara manual dan sederhana. Pencatatan berbasis buku tulis berpotensi menimbulkan kesalahan perhitungan, kehilangan data transaksi, serta kesulitan dalam melakukan evaluasi perkembangan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM belum memiliki sistem administrasi keuangan yang mendukung efisiensi dan transparansi usaha secara optimal.

Proses Pelaksanaan Program KKN

Pelaksanaan program KKN dimulai dengan sosialisasi mengenai pentingnya digitalisasi sistem pembayaran dalam mendukung daya saing UMKM. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan kelompok yang melibatkan pelaku usaha dan perangkat desa. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan QRIS, manfaat pembayaran non-tunai, serta prosedur pendaftaran dan penggunaan sistem tersebut. Pendekatan komunikatif dan dialogis digunakan agar materi mudah dipahami dan sesuai dengan konteks kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, tim pengabdian menjalin kolaborasi dengan pihak perbankan atau penyedia layanan QRIS untuk memfasilitasi proses registrasi dan aktivasi. Kolaborasi ini memungkinkan proses pendaftaran dilakukan secara terarah dan sesuai prosedur yang berlaku. Pendampingan teknis diberikan secara langsung kepada pelaku UMKM, mulai dari pengisian formulir hingga pemasangan kode QRIS di lokasi usaha.

Respons pelaku UMKM terhadap program ini menunjukkan kecenderungan positif. Meskipun pada tahap awal terdapat keraguan terkait keamanan dan kemudahan penggunaan, setelah diberikan pelatihan dan simulasi transaksi, sebagian besar peserta menunjukkan minat untuk mencoba dan mengimplementasikan QRIS dalam aktivitas usahanya. Respons tersebut menjadi indikator awal keberhasilan pendekatan partisipatif yang diterapkan.

Efektivitas Transaksi Pasca-Adopsi QRIS

Setelah implementasi QRIS, terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam pola transaksi. Kemudahan pembayaran menjadi salah satu manfaat utama yang dirasakan, baik oleh pelaku usaha maupun konsumen. Konsumen tidak lagi terbatas pada penggunaan uang tunai, sehingga proses transaksi menjadi lebih fleksibel.

Dari sisi kecepatan transaksi, penggunaan QRIS memungkinkan pembayaran dilakukan dalam waktu singkat tanpa perlu proses penghitungan uang kembalian. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan efisiensi pelayanan kepada konsumen, terutama pada jam-jam ramai. Selain itu, sistem notifikasi otomatis membantu pelaku usaha memastikan pembayaran telah diterima tanpa harus melakukan verifikasi manual yang rumit.

Transparansi pencatatan juga mengalami peningkatan karena setiap transaksi digital terekam secara otomatis dalam sistem. Fitur ini membantu pelaku usaha dalam memantau arus kas harian dan meminimalisasi potensi kesalahan pencatatan. Pengurangan risiko kehilangan atau kekeliruan dalam pengelolaan uang tunai menjadi nilai tambah yang signifikan bagi keberlanjutan usaha.



Foto 1. Pembuatan Qris kolektif terhadap UMKM di Desa Kedungwuluh



Foto 2. Pembuatan Qris kolektif terhadap UMKM di Desa Kedungwuluh

Dampak terhadap Kemajuan UMKM

Adopsi QRIS tidak hanya berdampak pada aspek teknis transaksi, tetapi juga berpotensi meningkatkan kemajuan usaha secara lebih luas. (Pratama, 2022) Kemudahan pembayaran membuka peluang bagi peningkatan omzet, khususnya dari konsumen yang lebih memilih transaksi non-tunai. Dengan tersedianya alternatif pembayaran digital, UMKM memiliki peluang menjangkau segmen pasar yang lebih luas.

Dari sisi daya saing, penggunaan QRIS memberikan citra modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena usaha dinilai mengikuti perkembangan sistem pembayaran nasional. Kepercayaan konsumen yang meningkat berkontribusi terhadap loyalitas pelanggan serta keberlanjutan usaha.

Selain itu, keterhubungan dengan sistem pembayaran digital membuka akses UMKM terhadap ekosistem ekonomi digital yang lebih luas, termasuk peluang integrasi dengan platform pemasaran daring dan layanan keuangan lainnya. Dengan demikian, adopsi QRIS menjadi pintu masuk bagi transformasi usaha menuju sistem yang lebih terstruktur dan berbasis teknologi.



Foto 2. Dampak Penggunaan Qris terhadap transaksi jual beli di Desa Kedungwuluh

Analisis Teoretis

Secara teoretis, program KKN dapat dipahami sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang menempatkan mahasiswa sebagai agen perubahan sosial. Pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan yang menekankan peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat melalui proses pendampingan dan transfer pengetahuan. Pelaku UMKM tidak hanya menerima fasilitas teknologi, tetapi juga memperoleh pemahaman dan keterampilan yang mendukung keberlanjutan usaha.

QRIS dalam konteks ini berfungsi sebagai alat inklusi keuangan yang memperluas akses pelaku usaha terhadap sistem pembayaran formal. (Jakarta: Bank Indonesia, 2019) Inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap layanan perbankan, tetapi juga dengan kemampuan memanfaatkan layanan tersebut secara efektif. (Jakarta: OJK, 2021) Dengan meningkatnya penggunaan QRIS, pelaku UMKM secara bertahap terintegrasi dalam sistem keuangan digital nasional.

Lebih jauh, transformasi digital dalam ekonomi lokal menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat menjadi katalisator pertumbuhan apabila diiringi dengan proses edukasi dan pendampingan yang tepat. Temuan pengabdian ini menguatkan pandangan bahwa digitalisasi bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan proses sosial yang memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, peran KKN sebagai jembatan antara kebijakan nasional dan praktik ekonomi lokal menjadi relevan dalam mendorong efektivitas transaksi dan kemajuan UMKM di tingkat desa.

SIMPULAN

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Desa Kedungwuluh menunjukkan peran strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pendekatan partisipatif berbasis digitalisasi sistem pembayaran. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pengenalan teknologi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan kepercayaan pelaku UMKM dalam mengadopsi sistem pembayaran non-tunai. Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan memperkuat proses transformasi yang berlangsung serta menciptakan rasa memiliki terhadap inovasi yang diperkenalkan.

Adopsi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terbukti meningkatkan efektivitas transaksi, baik dari aspek kemudahan pembayaran, efisiensi waktu, maupun transparansi pencatatan keuangan. Perubahan tersebut berimplikasi pada meningkatnya profesionalitas pengelolaan usaha, bertambahnya kepercayaan konsumen, serta terbukanya peluang perluasan pasar. Dengan demikian, digitalisasi pembayaran tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai instrumen penguatan daya saing dan kemajuan UMKM di tingkat desa.

Keberlanjutan program desa digital memerlukan sinergi antara pemerintah desa, lembaga keuangan, dan pelaku usaha agar pendampingan tidak berhenti pada tahap implementasi awal. Penguatan literasi digital secara berkelanjutan, monitoring penggunaan QRIS, serta integrasi dengan platform ekonomi digital lainnya menjadi langkah penting dalam memastikan transformasi ekonomi lokal berjalan secara konsisten dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan komitmen bersama, inisiatif ini berpotensi menjadi model pemberdayaan ekonomi desa berbasis digital yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2023). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Perekonomian Indonesia 2022*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Hendrawan, A., & Prasetyo, B. (2021). Digitalisasi UMKM dan transformasi ekonomi berbasis teknologi finansial di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 29(2), 145–160.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2022/2023*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Pratama, R., & Hidayat, T. (2022). Transformasi digital pada UMKM sebagai strategi peningkatan daya saing di era ekonomi digital. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 24(1), 55–67.
- Rahmawati, D. (2023). Implementasi QRIS dalam meningkatkan inklusi keuangan UMKM di wilayah pedesaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Indonesia*, 27(1), 89–104.
- Sari, N. (2021). Pemberdayaan masyarakat berbasis partisipatif dalam penguatan ekonomi lokal. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(3), 210–222.
- Sutrisno, E., & Wahyuni, L. (2020). Inklusi keuangan dan pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 101–115.
- Yustika, A. E. (2020). *Ekonomi kelembagaan: Paradigma, teori, dan kebijakan*. Jakarta: Erlangga.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2022/2023* (Jakarta: Kemenkop UKM RI, 2023), 1–3, <https://www.kemenkopukm.go.id/>.
- Bank Indonesia, *QR Code Indonesian Standard (QRIS): Satu QR Code untuk Semua Pembayaran* (Jakarta: Bank Indonesia, 2020), 2–6, <https://www.bi.go.id/QRIS>.
- Nur Sari, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Partisipatif dalam Penguatan Ekonomi Lokal,” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 5, no. 3 (2021): 214–218, <https://garuda.kemdikbud.go.id/>.
- Rizky Pratama dan Taufik Hidayat, “Transformasi Digital pada UMKM sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing di Era Ekonomi Digital,” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 24, no. 1 (2022): 58–62,

- Dwi Rahmawati, "Implementasi QRIS dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan UMKM di Wilayah Pedesaan," *Jurnal Keuangan dan Perbankan Indonesia* 27, no. 1 (2023): 92–97, <https://garuda.kemdikbud.go.id/>.
- otok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017), 82–86.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). FinTech, RegTech, and the reconceptualization of financial regulation. *Northwestern Journal of International Law & Business*, 37(3), 371–413.
- <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847806>
- Bank Indonesia. (2019). QR Code Indonesian Standard (QRIS): Standar Nasional Pembayaran Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.
- <https://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. (2020). Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Jakarta: Bank Indonesia.
- <https://www.bi.go.id>
- Bukht, R., & Heeks, R. (2017). Defining, conceptualising and measuring the digital economy. *Development Informatics Working Paper*, 68.
- <https://doi.org/10.2139/ssrn.3431732>
- Chambers, R. (2014). *Rural development: Putting the last first*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315835815>
- OECD. (2020). *Digital economy outlook 2020*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/bb167041-en>
- Rahayu, R., & Day, J. (2017). E-commerce adoption by SMEs in developing countries. *Information Development*, 33(4), 1–15.
- <https://doi.org/10.1177/0266666916651640>
- Tambunan, T. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(18).
- <https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4> van Dijk, J. (2020). *The digital divide*. Polity Press.
- World Bank. (2022). *Digital financial services*. World Bank Group. <https://www.worldbank.org>
- Pratama, A., & Hidayat, R. (2022). Digital transformation of MSMEs in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 3(2), 45–56.

Rahmawati, N. (2023). Implementasi QRIS dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat desa. *Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 5(1), 12–21.